

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Cindy Artika Sari¹, Nayla Nurhamidah², Viera Razaka Nabilla Qrisdadra³, Syed Agung Affandi⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jalan H.R. Soebrantas No. 155, KM. 15, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

12370521500@students.uin-suska.ac.id, 12370521714@students.uin-suska.ac.id,
12370520124@students.uin-suska.ac.id, syedagungafandi@uin-suska.ac.id

Article Info

Keywords:

SPBE, Good governance
Transformasi digital
Pelayanan publik
Reformasi birokrasi

This is an open access article under the
CC BY-SA license



Abstract

Artikel ini membahas efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan respons strategis terhadap tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai regulasi, kebijakan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPBE memiliki potensi signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, namun masih menghadapi berbagai tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya integrasi antarplatform, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan kebijakan SPBE yang inklusif agar implementasinya dapat berjalan optimal.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi publik. SPBE hadir sebagai bentuk integrasi teknologi informasi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan digital yang mampu meningkatkan efisiensi kerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Implementasi SPBE juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Indrajit (2020) yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang modern serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Urgensi penerapan SPBE semakin menguat sejalan dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,5 juta jiwa atau sekitar 78,6 persen dari total populasi, menunjukkan besarnya potensi basis pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.

2. Tinjauan Pustaka

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan bagian dari perkembangan e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. E-government tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis, struktur organisasi, pola komunikasi, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Indrajit (2020), penerapan teknologi digital dalam pemerintahan dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu. SPBE diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dengan demikian, keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur, regulasi, serta integrasi antarinstansi.

Penerapan SPBE memiliki keterkaitan erat dengan konsep good governance. Prinsip good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital dapat mendukung prinsip tersebut melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka, pelayanan yang lebih cepat, serta pengurangan proses administrasi yang bersifat manual.

Selain itu, keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Tingginya penetrasi internet di Indonesia menunjukkan adanya peluang besar untuk memperluas layanan pemerintahan digital. Namun, kesenjangan akses, literasi digital, keamanan informasi, dan kemampuan aparatur tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, implementasi SPBE perlu dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh makna yang mendalam. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis, memperkuat argumentasi penelitian, serta memahami hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah yang terindeks di Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "reformasi birokrasi", "implementasi kebijakan", "good governance", "pelayanan publik", dan "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Artikel yang digunakan merupakan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai jurnal, buku, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan implementasi SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis

data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti

Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi instansi pemerintah, serta buku referensi yang relevan dengan topik implementasi SPBE dan good governance. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi implementasi SPBE di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasinya.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan SPBE melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), indeks SPBE nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks SPBE Nasional tahun 2022 mencapai 2,34 dengan kategori “cukup”, kemudian meningkat menjadi 2,79 dengan predikat “baik” pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 3,12 pada tahun 2024 (KemenPAN-RB, 2024). Beberapa instansi telah mampu mengembangkan layanan digital yang terintegrasi dengan baik, sementara sebagian lainnya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta rendahnya integrasi sistem informasi.

Dengan adanya SPBE, berbagai proses administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dialihkan ke sistem digital. Hal ini diharapkan mampu meminimalkan praktik birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan rentan terhadap penyimpangan. Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE juga diharapkan mampu mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan aparatur sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi. Kemajuan SPBE Indonesia turut tercermin dalam pengakuan internasional, di mana berdasarkan UN E-Government Survey 2024, Indonesia berhasil naik 13 peringkat dari posisi 77 ke posisi 64 dari 193 negara dan untuk pertama kalinya masuk ke dalam kelompok very high EGDI (E-Government Development Index) (UNDESA, 2024).

2. Tantangan dan Hambatan Implementasi SPBE

Meskipun SPBE menunjukkan perkembangan yang positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kesiapan infrastruktur digital yang memadai. Masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, minimnya fasilitas teknologi, serta rendahnya kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem digital. Kesenjangan ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa indeks SPBE di kawasan Indonesia Timur hanya mencapai 2,14, jauh di bawah Indonesia Barat yang mencapai 4,02 dan Indonesia Tengah sebesar 3,53 (Pratama et al., 2025). Selain itu, permasalahan keamanan data dan integrasi antarplatform pemerintahan juga menjadi tantangan serius dalam penerapan SPBE.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Sulisty (2022), implementasi SPBE di Indonesia masih cenderung berfokus pada digitalisasi administratif dan belum sepenuhnya mengarah pada transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan kolaboratif. Banyak aplikasi pemerintahan yang masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara optimal sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi sistem serta inefisiensi anggaran.

3. SPBE dalam Mewujudkan Good Governance

Secara teoritis, implementasi SPBE dapat diukur melalui sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi informasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Jika SPBE mampu mempercepat pelayanan, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka implementasi SPBE dapat dikatakan berhasil dalam mendukung terwujudnya good governance.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital pemerintah. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan berbasis elektronik akibat keterbatasan literasi digital. Hasil Survei Status Literasi Digital Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa

Indeks Literasi Digital Indonesia meningkat menjadi 3,65 dari skala 5, namun angka tersebut masih berada pada level sedang dan belum merata di seluruh wilayah (Kominfo, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. SPBE berpotensi memperkuat prinsip-prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik melalui digitalisasi layanan pemerintahan. Capaian Indeks SPBE Nasional yang meningkat dari 2,34 pada tahun 2022 menjadi 3,12 pada tahun 2024, serta naiknya peringkat Indonesia ke posisi 64 dunia dalam UN E-Government Survey 2024, menjadi bukti nyata kemajuan yang telah dicapai. Namun, keberhasilan penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek teknologi, sumber daya manusia, regulasi, maupun partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi berkelanjutan dan perbaikan kebijakan secara menyeluruh. Peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi di daerah, serta integrasi antarplatform pemerintahan menjadi agenda prioritas yang perlu segera ditangani agar implementasi SPBE dapat berjalan secara inklusif, efektif, dan merata di seluruh wilayah Indonesia demi terwujudnya good governance yang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syed Agung selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Birokrasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, serta motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Berbagai masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami materi dan menyelesaikan artikel dengan baik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman satu kelompok yang telah kebersamaian, bekerja sama, bertukar pikiran, serta memberikan kontribusi terbaik dalam proses penyusunan artikel ini. Semangat, dukungan, dan kerja sama yang terjalin menjadi faktor penting dalam terselesaikannya artikel ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan wawasan dalam kajian Reformasi Birokrasi.

References

- Indrajit, R. E. (2020). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Setiawan, A., & Sulistyio, B. (2022). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 115–128.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Internet APJII 2024*. Jakarta: APJII.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Status Literasi Digital di Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2024). *Kementerian PANRB umumkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023*. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023>
- Pratama, M. R., Pramono, T., Muzaqi, A. H., Tualeka, S. H., Wulandari, N. P. F., & Maharani, A. (2025). Analisis tantangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) di Indonesia Timur. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 9(2).
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2024). *UN E-Government Survey 2024*. New York: United Nations.